

**DINAMIKA SD INPRES DI KOTA MAGELANG
TAHUN 1973-1983**

e-journal

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra**



Oleh :

FUAD YULIANTO

12407144025

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2016

THE DYNAMICS OF INPRES ELEMANTARY SCHOOLS IN MAGELANG CITYIN YEAR 1973-1983

By Fuad Yulianto
NIM. 12407144025

Abstract

At the beginning of the Soeharto era, the government recognizes the importance of education because there are still a lot of school-aged children who didn't get any education. To equalize the chance school-aged children in education, then the New Order government launched a policy namely SD Inpres program throughout Indonesia. Prior to the policy SD Instruction, the conditions of Elementary education in Magelang city are very *alarming*. The existing school could not accommodate the number of children of school age evenly, so that many school-aged children could not get any education. Because of the launching of the Presidential Instruction in 1973, the development of SD Inpres begins to grow. The first development is focused on rural and urban areas where the population have low-income and also considered some areas where there are many school-age children. The government also supported the program-SD Instruction by launched other programs include: Developing new buildings, adding textbooks, upgrading and inauguration of primary school teachers, adding facilities, creating of new curriculum, equipment, and infrastructures. The impacts SD Inpres policy are: The increasing number of elementary schools in every village, the increasing school-age children who receive education equally, and many of graduates of Teacher Education School got jobs so the unemployment rate is reduced. The policy of SD inpres aims to realize the implementation of the compulsory six years learning program, in order to make better education.

Keywords: *School Elementary Instruction, Magelang City, Year 1973-1983.*

DINAMIKA SD INPRES DI KOTA MAGELANG TAHUN 1973-1983

Oleh: Fuad Yulianto
NIM. 12407144025

Abstrak

Pada awal masa pemerintahan Soeharto, pemerintah menyadari pentingnya pendidikan dikarenakan masih banyak anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan. Untuk meratakan kesempatan anak usia sekolah memperoleh pendidikan, maka pemerintah Orde Baru mencanangkan program kebijakan SD Inpres di seluruh Indonesia. Sebelum adanya kebijakan SD Inpres, kondisi pendidikan SD di Kota Magelang sangat memprihatinkan. Sekolah yang telah ada tidak dapat menampung jumlah anak usia sekolah secara merata, sehingga mengakibatkan banyak anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan. Dikeluarkannya Instruksi Presiden tahun 1973, SD Inpres mulai dibangun. Pembangunan terlebih dulu difokuskan pada daerah pedesaan dan di wilayah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah serta memperhatikan wilayah yang banyak terdapat anak usia sekolah. Pemerintah mengeluarkan program-program pendukung kebijakan SD Inpres diantaranya: Pembangunan gedung-gedung baru, penambahan buku-buku pelajaran, penataran dan pengangkatan guru SD, penambahan alat-alat peraga, pembuatan kurikulum baru dan perlengkapan sarana dan prasarana. Dampak kebijakan SD Inpres, jumlah gedung SD lebih meningkat disetiap kelurahan, bertambahnya anak usia sekolah memperoleh pendidikan secara merata, banyaknya lulusan Sekolah Pendidikan Guru mendapat pekerjaan sehingga tingkat pengangguran berkurang. Adanya kebijakan SD Inpres ini kedepannya bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program gerakan wajib belajar 6 tahun, agar pendidikan lebih baik dan tertata.

Kata kunci: *SD Inpres, Kota Magelang, Tahun 1973-1983.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan dari sumber arsip, daerah Kota Magelang banyak terjadi pembangunan gedung SD Inpres mulai dari tahun 1973. Sampai saat ini beberapa bangunan gedung SD Inpres masih dapat digunakan untuk proses belajar mengajar meski sudah terjadi rehabilitasi. Melihat banyaknya pembangunan SD yang berdiri disetiap kelurahan, menunjukkan bahwa sebelum adanya kebijakan

SD Inpres pada zaman Orde Baru, dapat dikatakan di Kota Magelang sekolah-sekolah masih terbatas.

Menurut Bapak Wasito¹ sebelum dikeluarkan kebijakan SD Inpres, permasalahan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan SD sangat memprihatinkan. Anak usia sekolah 7-12 tahun pada kala itu banyak, sedangkan daya tampung (SD) sangat minim. Hal ini mengakibatkan banyak anak usia sekolah tidak dapat memperoleh pendidikan, sehingga kebodohan serta buta aksara dapat terjadi. Berdasarkan dari sumber arsip, di Kota Magelang sebelum adanya pembangunan SD Inpres, anak usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan berjumlah 1.577 dikarenakan ketiadaan gedung sekolah beserta sarana dan prasarana.²

B. KONDISI SEKOLAH DASAR SEBELUM TAHUN 1973 DI KOTA MAGELANG

Kondisi pendidikan di Kota Magelang sebelum tahun 1973 sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan hancurnya gedung-gedung sekolah dasar (SD) akibat Agresi Militer, mengakibatkan murid-murid yang dulunya bersekolah di SD tidak dapat memperoleh pendidikan. Proses belajar masih dapat berjalan,

¹Wawancara dengan Bapak Wasito, 19 Mei 2016.

²Arsip Pemerintah Daerah Kotamadya Magelang, *JawabanPertanyaan Dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Komisi B/DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Tengah*, No. 10, 1973.

yaitu dengan menggunakan gedung-gedung SD yang masih ada. Gedung SD yang masih berdiri, hampir semua digunakan untuk dua sekolah.³

Mengetahui kondisi pendidikan yang memprihatinkan, pemerintah kemudian bekerjasama dengan masyarakat. Bentuk kerjasama yaitu dengan menyewa rumah-rumah penduduk untuk kegiatan belajar mengajar. Sampai pada tahun 1966 kebutuhan akan pendidikan sangat dirasakan masyarakat Kota Magelang, akan tetapi pembangunan gedung-gedung boleh dikatakan tidak ada. Sekolah-sekolah Dasar yang berkembang hanya menempati gedung-gedung bekas sekolah zaman Belanda.⁴ Kondisi daya tampung pendidikan SD pada kala itu juga masih bersifat *gedek*.⁵

Pada tahun 1969 Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang mengetahui situasi kondisi pendidikan yang menyedihkan terutama SD yaitu hampir separoh dari jumlah SD yang ada, tidak mempunyai ruang belajar sendiri, dan banyak SD yang menempati rumah kampung. Melihat kondisi SD yang memprihatinkan serta yang sangat tidak memenuhi syarat, timbulah ide untuk mengkoordinir uang sumbangan pendidikan SD yang dapat dipertanggung

³ Soekimin Adiwiratmoko, *Sejarah Perjuangan Masyarakat Kota Magelang di Masa Perjuangan Fisik*, (Magelang: Dewan Harian Cabang, 1998), hlm. 82.

⁴ Pemerintah Kota Magelang, *op.cit.*, hlm. 16.

⁵ Gedek merupakan anyaman yang terbuat dari bilah-bilah bambu yang digunakan untuk dinding sekolah, dinding rumah dan sebagainya, Lihat Lampiran 6, hlm. 117.

jawabkan penggunaannya menurut hukum. Oleh karena itu, pada tahun 1970 diberlakukan pajak sekolah di Kota Magelang.⁶

Pengumpulan pajak sekolah selama 3 tahun, Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp.11.989.50 dan berhasil membangun 23 unit gedung sekolah SD masing-masing 5 ruang kelas lengkap dengan peralatannya serta merehabilitasi gedung yang telah rusak sebanyak 58 ruangan kelas. Peraturan Pajak sekolah ini hanya berlaku selama 3 tahun, karena kemudian keluar keputusan 3 Menteri mengenai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).⁷

C. PERKEMBANGAN SD INPRES DI KOTA MAGELANG MASA ORDE BARU

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi suksesnya program wajib belajar serta jalannya sistem pendidikan adalah perangkat pendidikan. Perangkat pendidikan merupakan komponen yang didalamnya terdiri dari gedung sekolah dan perlengkapannya, murid, dan guru. Ketiga kelompok besar ini sangat menentukan sukses tidaknya usaha penyelenggaraan pendidikan. Fasilitas-fasilitas untuk menunjang pendidikan SD Inpres, diantaranya: v

1. Pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar Inpres

Tabel 1.
Nama SD Inpres yang dibangun pada tahun 1973-1979 di Kota Magelang

No	Tahun					
	1973/1974	1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1978/1979

⁶Pemerintah Kota Magelang, *op.cit.*, hlm. 76.

⁷*Ibid.*

1	SD Pucangsari	SDPucangsari	SD Magelang I	SD Magelang I	SD Dalangan.	SD Dalangan.
2	SD Pinggir.	SD Pinggir.	SD Magelang V.	SDMagelang V.	SD Sanden I.	SD Sanden I.
3	SD Jambesari.	SD Jambesari.	SD Magelang VII.	SD Magelang VII.	SD Sanden II.	SD Sanden II.
4	SD Depok	SD Depok	SD Potrobangsan IV	SD Potrobangsan IV.	SD Dekil.	SD Dekil.
5	SD Malanggate n.	SD Malanggate n.	SD Kramat II.	SD Kramat II.	SD Sanggrahan I.	SD Sanggrahan I.
6			SD Cacaban II.	SD Cacaban II.	SD Sanggrahan II.	SD Sanggrahan II.
7			SD Tidar IV	SD Tidar IV.	SD Potrobangsan.	SD Potrobangsan.
8			SD Rejowinangun XI.	SD Rejowinangun XI.	SD Potrobangsan Krajan.	SD Potrobangsan Krajan.
9					SD Ngentak Kwayuhan.	SD Ngentak Kwayuhan.
10					SD Kwayuhan.	SD Kwayuhan.
11					SD Meteseh I.	SD Meteseh I.
12					SD Meteseh II.	SD Meteseh II.
13					SD Jagoan.	SD Jagoan.
14					SD Jagoan I.	SD Jagoan I.
15					SD Karanglor I.	SD Karanglor I.
16					SD Karanglor II.	SD Karanglor II.
17					SD Tidar Krajan I.	SD Tidar Krajan I.
18					SD Tidar Krajan II.	SD Tidar Krajan II.

Sumber: Arsip *Daftar Rekapitulasi Pembangunan Gedung SD (Proyek Inpres) di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, 1980,*

2. Fasilitas

Faktor terpenting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah soal fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas tersebut sebagai penunjang dalam

menjalankan sistem pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di bawah ini fasilitas (sarana dan prasarana) tiap-tiap kelas SD Inpres di Kota Magelang:

- 1) 20 (duapuluh) meja dengan ukuran 1,2 x 0,5 x 0,75 M.
- 2) 20 (dua puluh) bangku dengan ukuran 1,2 x 0,3 x 0,45 M.
- 3) 1 Papan tulis ukuran 150 x 125 lengkap dengan standard.
- 4) 1 buah almari besar tempat hasil prakarya pintu dua, dengan ukuran: tinggi 170, lebar 70, tebal 45.
- 5) 1 buah almari administrasi pintu satu, dengan ukuran: tinggi 170, lebar 70, tebal 45.
- 6) Tempat kapur.
- 7) 2 buah penunjuk dari kayu dengan ukuran panjang 1 M.
- 8) Papan kecil untuk absen murid ukuran 60 x 80.
- 9) Papan kecil untuk kegiatan ukuran 60 x 80.
- 10) 1 meja + kursi guru (kursi makan) laci di tengah ukuran 80 x 120 x 75.
- 11) 2 penghapus, bendera merah putih kecil, gambar Presiden dan Wakil Presiden, Lambang Negara dan Pancasila.⁸

3. Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan dilakukan dengan menyeluruh, merata sehingga semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama. Buku-buku yang sudah dicetak juga berlaku selama kurikulum itu masih berlaku. Jika kurikulum sudah tidak memadai lagi, maka

⁸Arsip Pemerintah Daerah Kodya Magelang, *Daftar Perabot dan Alat SD Inpres*, No. 10, 1973, Lihat Lampiran 8, hlm. 120.

kurikulum perlu disempurnakan. SD Inpres menggunakan kurikulum 1975 mencakup sembilan bidang studi: Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Olahraga dan Kesehatan, Kesenian, dan Keterampilan khusus. Bahasa daerah masuk dalam kurikulum ini, sudah termasuk dalam bagian bidang studi Bahasa Indonesia.⁹

4. Biaya Masuk SD Inpres

Sejak pertama kali SD Inpres dibuka yaitu pada tahun 1974 di Kota Magelang, penulis belum dapat menemukan mengenai sumber biaya yang diperlukan untuk siswa yang akan bersekolah. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh mahasiswa UGM, berjudul *Sejarah pendidikan di Manggarai tahun 1950-1984* Program SD Inpres pada dasarnya merupakan program pendidikan yang menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat.¹⁰

Memasuki tahun 1978/1979 biaya masuk SD Inpres (BP3) yaitu berkisar Rp.100-250 rupiah per-bulan. Jumlah tersebut termasuk tinggi mengingat pada saat itu biaya kehidupan berbeda dengan sekarang. Masih banyak orang tua yang kesulitan untuk membayar, tetapi kesulitan atau tidak tergantung kepedulian dari orang tua (wali murid).¹¹

⁹Arsip Nasional Republik Indonesia, *gambaran singkat tentang kurikulum SD, 1975*, Lihat Lampiran 9, hlm. 121.

¹⁰Yustinus Bakneno, "Sejarah pendidikan di Manggarai tahun 1950-1984", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm. 55.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wasito, 19 Mei 2016.

5. Sistem Ujian SD Inpres

Ujian merupakan kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan siswa, serta untuk menentukan kemampuan seseorang. Sistem ujian sekolah dasar SD Inpres menggunakan ujian sekolah.¹² Ujian sekolah merupakan ujian yang diselenggarakan dalam upaya menentukan tingkat kemampuan anak didik sehingga dapat diketahui kelayakannya lulus atau tidaknya di bangku SD.

Tingkat kelulusan SD Inpres diukur dari mata pelajaran yang diujikan, antara lain ialah Matematika, PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Penilaian raport dengan menggunakan caturwulan sekali (empat bulan sekali) Nilai rata-rata menggunakan nilai 73, 75, 70.¹³

6. Tenaga Pendidikan

Guru-guru yang mengajar di Sekolah Dasar Inpres berasal dari lulusan SPG, SGA dan SGO. Latar belakang didirikannya SPG adalah diberlakukannya Undang-Undang No.4 Tahun 1950, bahwa pendidikan merupakan hak rakyat dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa propinsi memiliki wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.¹⁴

Memasuki masa Orde Baru, permasalahan pendidikan yang harus dihadapi oleh pemerintah yaitu menyediakan pendidikan guru/kurangnya tenaga pengajar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya instruksi dari Presiden Soeharto untuk

¹²Wawancara dengan Ibu Ningsih, 08 Agustus 2016.

¹³ Wawancara dengan Bapak Mursidi, 08 Agustus 2016.

¹⁴ H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 79.

mendirikan Sekolah Dasar sebanyak 6.000 SD pada tahun 1973. Sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan daya tampung ternyata memunculkan masalah baru, yaitu kekurangan tenaga pendidik yang disebabkan oleh banyaknya sekolah yang dibangun. Oleh karena itu pada masa Orde Baru banyak didirikan SPG, SGO, dan SGA.

7. Gaji Guru

Pada awal didirikannya SD Inpres penulis belum mendapatkan sumber mengenai berapa gaji guru, tetapi menurut Bapak Mursidisebelum tahun 1973 (sebelum Inpres) gaji guru dapat habis selama 10 hari. Oleh karena dari itu banyak masyarakat tidak menginginkan menjadi guru, lebih memilih menjadi kondektor karena gajinya lebih banyak. Setelah diadakan pembangunan SD Inpres (1973) penggajian guru sudah mulai tertata, dapat dikatakan cukup. Pada tahun 1975/1976 gaji guru ±Rp. 16.000,00.

Memasuki tahun 1978/1979 gaji guru SD sudah standar (dapat untuk biaya hidup selama satu bulan) berkisar Rp16.960,00-17.000,00 perbulan.¹⁵ Menurut Ibu Ningsih ketika menerima gaji terkadang guru dari rumah sudah membawa kembalian supaya tidak susah mencari kembaliannya.¹⁶ Dengan jumlah gaji yang dapat dikatakan minim pada saat ini, tetapi jumlah tersebut dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para guru pada tahun 1978-1983.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mursidi, 08 Agustus 2016, Lihat Lampiran 20, hlm. 137.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ningsih, 08 Agustus 2016, Lihat Lampiran 20, hlm. 136.

D. DAMPAK SD INPRES DI KOTA MAGELANG

Adanya kebijakan Intruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tentu saja menyebabkan dampak dalam berbagai bidang kehidupan di Negara Indonesia. Dampak yang terlihat adalah pada bidang pendidikan dan bidang sosial.

1. Dampak dalam Bidang Pendidikan

a. Banyaknya sekolah-sekolah yang berdiri

Didirikannya gedung SD Inpres, memberikan dampak positif pada aspek pendidikan. Dampak tersebut salah satunya ialah meningkatnya jumlah sekolah-sekolah Dasar.

b. Bertambahnya siswa pada Sekolah Dasar

Bertambahnya jumlah gedung SD Inpres yang dibangun, maka anak usia sekolah dapat mudah tertampung di SD Inpres secara luas. Sehubungan dengan banyaknya gedung SD Inpres yang dibangun, menyebabkan dampak yang menggemirakan bagi masyarakat kota Magelang karena anak-anak yang tidak dapat tertampung pada SD yang telah ada akan dapat bersekolah di SD Inpres tersebut

c. Tingkat kebodohan dan buta aksara berkurang

Dalam memajukan kesejahteraan suatu bangsa, tentunya diperlukan perhatian dari pemerintah. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini pemerintah memberikan kebijakan program SD Inpres, selain untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak usia sekolah juga dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terbukti pada tahun 1978 Presiden Soeharto menegaskan:

pembangunan disiapkan untuk masa depan yang lebih baik. Tujuan pembangunan ialah terus berusaha menserasikan kemajuan lahir dan batin, memperbesar kemampuan dan ketinggian moral. Karena itu, pengetahuan yang harus kita gali dan kita sebarluaskan harus mencakup segala kebutuhan manusia.¹⁷

Maksud dari penegasan tersebut ialah program pemerintah bukan hanya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa bantuan pembangunan gedung SD, tetapi kedepannya untuk menjadikan bangsa Indonesia memiliki mutu pendidikan yang tinggi. Keselarasan peningkatan mutu dapat terwujud setelah disediakan tempat belajar mengajar. Dengan banyaknya tempat pendidikan, maka dari itu banyak anak usia sekolah tertampung, otomatis tingkat kebodohan dan tingkat buta aksara lambat laun akan berkurang.¹⁸

2. Dampak dalam Bidang Sosial

a. Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat

Pelaksanaan pembangunan SD Inpres di Kota Magelang dilakukan dengan tenaga kerja borongan.¹⁹ Dilakukannya pekerjaan secara borongan akan memberikan keuntungan yaitu: penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, pengelolaan admistrasinya mudah, dan pembiayaan bisa dilaksanakan dengan angsuran berdasarkan atas kemajuan fisik pekerjaan.²⁰

¹⁷*Bernas*, No. 27, Tahun XVII, Desember 1978, hlm. 7.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Wasito, 19 Mei 2016.

¹⁹Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

²⁰Arsip Pemerintah Kodya Magelang, *Questionere Tentang Hasil Pelaksanaan Pembangunan SD Inpres*, No. 6/1975.

Pelaksanaan pembangunan SD Inpres dilakukan dengan pemborong disamping memberikan keuntungan pada aspek pembangunan, jika dilihat pada aspek sosial dapat memberikan terbukanya lapangan pekerjaan. Maksud dari memberikan lapangan pekerjaan, karena pekerja yang membangun SD tersebut berasal dari lingkungan sekitar atau di daerah Kota Magelang. Dengan demikian dapat dikatakan adanya SD Inpres di seluruh Indonesia memberikan dampak tentang terbukanya lapangan pekerjaan di suatu daerah.

b. Terserapnya lulusan Sekolah Pendidikan Guru

Banyaknya pembangunan SD Inpres di seluruh Indonesia, mengakibatkan kebutuhan guru yang semakin banyak. Oleh sebab itu pemerintah juga mencanangkan untuk memperbanyak SPG agar target pemenuhan guru tersebut cepat tercapai. Sebagian besar guru SD Inpres dari lulusan SPG, SGO, SGA. Didirikannya sekian ribu SD Inpres, maka akhirnya pemerintah membuka kesempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).²¹

E. KESIMPULAN

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Magelang sebelum adanya kebijakan SD Inpres berdasarkan sumber, jumlah sekolah yang ada tidak seimbang dengan jumlah anak usia sekolah. Sekolah yang telah ada pun kondisi bangunannya dapat dikatakan memprihatinkan, masih bersifat sederhana (*gedek*). Letak sekolah dari rumah juga cukup jauh serta masih minimnya alat transportasi. Oleh karena itu, pada tahun 1966 masyarakat juga turut membantu

²¹Wawancara dengan Bapak Fadhil, 09 Agustus 2016.

dan mendukung jalannya proses pendidikan. Dukungan dari masyarakat sekitar salahsatunya membantu dengan menyediakan tempat belajar mengajar di pemukiman-pemukiman warga atau di balai kampung.

Setelah pemerintah mengumpulkan uang dari pajak sekolah selama 3 tahun dan mendapat tanah untuk membangun gedung SD, barulah pemerintah Kota Magelang membangun SD disetiap kelurahan berjumlah 2 unit SD. Pengumpulan pajak tersebut berhasil membangun 23 unit gedung sekolah SD masing-masing 5 ruang kelas. Berhasilnya membangun 23 unit SD, proses belajar mengajar yang dulunya dilakukan di pemukiman-pemukiman warga dan di balai kampung, berpindah ke gedung sekolah yang baru.

Pada perkembangannya mengingat jumlah anak usia sekolah yang semakin meningkat serta disetiap kelurahan hanya terdapat 2 unit SD, tentu saja jumlah tersebut dapat dikatakan jauh dari cukup guna menampung anak usia sekolah. Sebelum awal berdirinya pembangunan SD Inpres di Kota Magelang jumlah anak yang tidak dapat bersekolah di SD sebanyak 1.577 anak. Melihat kondisi pendidikan yang banyaknya anak yang tidak dapat tertampung di SD, maka dari itu wilayah Kota Magelang pada tahun 1973 mendapat bantuan pembangunan SD Inpres.

Semangat yang tinggi pemerintah dalam bidang pendidikan mulai dari dialihfungsikannya SPG, didirikannya gedung SD, perubahan kurikulum SD, dilengkapinya fasilitas pendidikan, penyediaan guru, diberikannya buku-buku pelajaran dan buku bacaan tentunya berdampak pada aspek pendidikan. Dampak kebijakan SD Inpres tersebut adalah akses anak usia sekolah untuk memperoleh

pendidikan semakin mudah sehingga meningkatnya jumlah anak SD dan semakin banyaknya gedung-gedung SD.

Meningkatnya jumlah tempat belajar mengajar, anak usia sekolah tertampung, serta sudah tertatanya fasilitas pendidikan, maka dari itu tujuan pemerintah guna mencanangkan program wajib belajar menuai hasil. Hal tersebut dibuktikan pada tanggal 2 Mei 1984 ketika upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Stadion Senayan, Presiden mencanangkan gerakan wajib belajar dan menekan tombol sirine tanda dimulainya gerakan wajib belajar. Adanya gerakan wajib belajar ini diharapkan semua anak usia 7-12 tahun dapat tertampung di SD, sekaligus kedepannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Beeby C.E, Pendidikan di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1981.

Depdikbud RI, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Departemen Penerangan RI, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto, Jakarta: Perc. Negara, 1974.

Muhammad Rifa'i, Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik Hingga Modern, Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2012.

Prijono, Onny S. & A. M. W. Pranarka, Situasi Pendidikan Di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir (Bagian II-A), Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS), 1980.

Pemerintah Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang dari Masa ke Masa, Magelang: Pemkab Magelang, 2011.

Pemerintah Kota Magelang, Tiga Belas Tahun Perkembangan Kota Magelang, Magelang: Pemkot Magelang, 1966.

Soekimin Adiwiratmoko, Sejarah Perjuangan Masyarakat Kota Magelang di Masa Perjuangan Fisik, Magelang: Dewan Harian Cabang, 1998.

Wardiman Djojonegoro, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 1996.

Daliman, A., *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Departemen Penerangan RI,

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah, 2013.

Skripsi

Mela Mita Septiana, “Kebijakan Pendidikan Menteri Syarif Thayeb Tahun 1974-1978”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

Yustinus Bakneno, “Sejarah pendidikan di Manggarai Tahun 1950-1984”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.

Sumber Surat Kabar dan Majalah

Bernas, No. 27, Tahun XVI, Desember 1976.

Bernas, No.27, Tahun XVII, Desember 1978.

Daftar Responden

No	Nama	Tempat tanggal lahir/Usia	Pekerjaan		Alamat
			Dulu	Sekarang	
1	Bapak Wasito	Magelang, 12 Januari 1951/65	Guru SD Inpres	Dinas Pendidikan	Kemirirejo
2	Bapak Mursidi	Magelang, 16 Oktober 1949/67	Kepala Sekolah SD Inpres	Kepala UPT Magelang Selatan	Blondo
3	Bapak Fadli	Magelang, 28 Agustus 1946/70	Guru SD Inpres	Pensiunan	Srowol
4	Ibu Sri Rahayu	Magelang, 6 November 1944/72	Guru SD	Pensiunan	Bayeman
5	Ibu Yuliati Kristina	Magelang, 4 Oktober 1969/47	Murid SD Inpres	Swasta	Kebonpolo
6	Bapak Fajar	Magelang, 17 Februari 1965/51	Murid SD Inpres	Swasta	Muntilan
7	Ibu Ningsih	Temanggung 8 Desember 1956/60	Guru SD Inpres	Guru	Magelang
8	Ibu Musyarofah	Magelang, 4 Januari 1957/59	Guru SD Inpres	Guru	Rejowinangun
9	Bapak Soerowo	Magelang, 21 Agustus 1938/78	Guru SD	Pensiunan	Kemirirejo

Yogyakarta, 11 Desember 2016

Pembimbing



Danar Widiyanta, M.Hum
NIP.19681010 199403 1 001

Reviewer



Ririn Darini, M.Hum
NIP. 1974118 199903 2 001